

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Magdalena, dkk. (2021). *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Tasikmalaya: Literasiologi.
- Amelia, D, dkk. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Fuady Munir (2020). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

### B. Jurnal

- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19.A,
- Fitria, A. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1), 18-28.

Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).

Juliantini, N. N., Arjaya, I. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 101-105.

Lindati, D., & Dianne, E. R. (2018). ANALISIS HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN (Studi Putusan No. 59/Pdt. Sus-PKPU. PN. Niaga. Jkt. Pst). *Pactum Law Journal*, 1(02), 90-98.

Purba, M., Sunarmi, S., Nasution, B., & Devi, K. (2019). Homologasi Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Se-bagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No 137K/PDT. SUS-PKPU/2014). *Usu Law Journal*, 7.

Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.

Swari, I. A. K. W., Dirksen, A. G. N., & Darmadi, A. S. W. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan. *Kertha Semaya*, 2(01).

Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.

Tampemawa, S. G. (2019). Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, 7(6).

Lumban Gaol, Y. (2024). *Analisis Yuridis Kekuatan hukum Pemungutan Suara (Voting) oleh Kreditor Konkuren Terhadap Perpanjangan Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* (Studi putusan Nomor 254/PDT. Sus-PKPU 2022 PN. Niaga Jkt. Pst) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Lindati, D., & Dianne, E. R. (2018). ANALISIS HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN (Studi Putusan No. 59/Pdt. Sus-PKPU. PN. Niaga. Jkt. Pst). *Pactum Law Journal*, 1(02), 90-98.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*.

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

#### **D. Lain-Lain**

Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant. (2025). *Gianina Law Firm: Kantor Pengacara Surabaya*. Diakses pada 15 April 2025, dari <https://gianinalawfirm.com/>